
GERTAK TANPA DUSTA Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang

Haeran

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah STIES Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur
haeran.linguistik@gmail.com

Abstrak

Penelitian membahas terkait dengan dampak kebijakan Gertak Tanpa Dusta terhadap perekonomian masyarakat Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang serta permasalahan yang ditemui dalam proses munculnya kebijakan Gertak Tanpa Dusta tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara serta metode dokumentasi yang ada hubungannya dengan judul. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan adalah: *Pertama*, dikeluarkannya kebijakan GERTAK TANPA DUSTA di Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini karena intensitas tanam yang dilakukan dua kali dalam satu tahun. *Kedua*, hambatan yang dihadapi dalam proses munculnya kebijakan GERTAK TANPA DUSTA adalah adanya penolakan dari masyarakat, terbatasnya lahan, faktor umur petani, tingkat pendidikan petani, pengalaman berusaha tani, intensitas penyuluhan serta permodalan. Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pemberian bantuan berupa Bantuan Langsung Banih Unggu (BLBU), bantuan pupuk, bantuan alat mesin pertanian serta menekan alih fungsi lahan.

Kata Kunci: *Dampak, Kebijakan, Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris di mana sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia (Alfian, 2008). Sebagai negara agraris, pertanian memiliki peranan yang penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari banyak penduduk bekerja pada sektor pertanian atau produk nasional yang berasal dari pertanian. Pertanian dalam arti luas terdiri atas 5 (lima) sub sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Wilayah pedesaan yang bercirikan pertanian sebagai basis ekonomi, sedangkan wilayah perkotaan yang tidak lepas dari aktivitas ekonomi baik yang sifatnya

industri, perdagangan maupun jasa mengalami pertentangan luar biasa di dalam pertumbuhan pembangunan. Dengan kemajuan yang dicapai sektor pertanian tanaman pangan, maka pembangunan sektor industri yang didukung sektor pertanian juga semakin maju (Al-Hakam, 2005).

Kebijakan pemerintah yang semakin terfokus pada sektor industri memicu hadirnya permasalahan struktural petani. Petani semakin terpisah dari tanah sebagai sumberdaya utama dalam melakukan kegiatan pertanian. Selama dekade 1990-an jumlah petani gurem yang mengusahakan lahan kurang dari 0,5 hektar meningkat dengan laju 1,5 persen dan jumlah buruh tani meningkat dengan laju hampir 5,0 persen per tahun (Sajogyo, 2003).

Permasalahan petani yang banyak terjadi hampir di semua daerah di Indonesia salah satunya adalah penguasaan dan pemanfaatan lahan pertanian oleh petani yang semakin menyusut. Hal tersebut terjadi sebagian besar diakibatkan oleh pengalihfungsian lahan pada pihak perusahaan. Petani menjadi terbatas dalam penguasaan maupun pemanfaatan lahan pertanian. Permasalahan tersebut berakibat pada rendahnya pendapatan petani (Lalla, 2012).

Upaya pemecahan masalah telah dilakukan oleh petani dan pihak terkait, dalam hal ini pemerintah. Pemecahan permasalahan dilakukan melalui program-program maupun proyek-proyek pembangunan pertanian. Program pembangunan pertanian yang ada bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Namun demikian, perlu untuk diketahui bagaimana dampak pelaksanaan program terhadap petani.

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi petani tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membuat suatu pemecahan dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas komoditi pertanian melalui kebijakan pertanian yang lebih memihak petani yang dikenal dengan program Gerakan Tanam Padi Dua Kali Setahun (Gertak Tanpa Dusta) dan Sekali Tanam Dua Kali Panen (Senam Dupa). Program tersebut bertujuan untuk menopang program nasional dalam peningkatan produksi padi, jagung dan kacang kedelai.

Dikeluarkannya kebijakan tersebut sebagai sebuah solusi mengatasi persoalan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki sawah pasang surut, namun keberadaannya menghadapi ancaman cukup serius, karena terjadinya alih fungsi lahan sawah tersebut untuk berbagai keperluan baik untuk perluasan perkebunan kelapa sawit ataupun penggunaan untuk keperluan non pertanian. Kondisi tersebut juga dibarengi dengan tingginya laju pertambahan penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun di kawasan tersebut.

Melalui program tersebut diharapkan sebagai solusi pemerintah dalam upaya meningkatkan produksi padi guna menunjang percepatan program peningkatan produksi beras nasional. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menetapkan seluas 17.000 hektar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan 4.000 hektar lahan cadangan pangan. Penetapan itu

dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011 – 2031, dan ini satu-satunya di Provinsi Jambi.

Pelaksanaan program kegiatan Gertak Tanpa Dusta yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat kepemimpinan mantan Bupati Zumi Zola – Ambo Tang yang dimulai sejak tahun 2011 melalui proses yang panjang dan berliku. Langkah tersebut terbilang berani mengingat lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa gambut dengan air asam. Lahan pertanian yang bagi sebagian masyarakat dinilai tidak mudah untuk diolah. Kebijakan tersebut pada awalnya mendapat penolakan dari masyarakat, namun Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung tidak gentar dengan keluhan dan penolakan petani saat pertama kali menggulirkan program tersebut.

Program Gertak Tanpa Dusta mencapai 1.500 hektar yang tersebar di 6 (enam) kecamatan. Sebanyak 30 persen atau lebih kurang seluas 625 hektar dari luas total tersebut berada di Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang yang dilaksanakan oleh 16 kelompok tani dan 1 (satu) Gapoktan. Rata-rata produktivitas yang dihasilkan dari beberapa kelompok tani yang telah melaksanakan panen sebelumnya mencapai 4,7 ton sampai dengan 5,2 ton Gabah Kering Padi (GKP) per hektar. Hasil ini lebih tinggi dari rata-rata produktivitas kabupaten, yaitu 3,9 ton GKP per hektar.

Selain sebagai solusi terhadap terhadap banyaknya alih fungsi lahan sawah untuk berbagai keperluan baik untuk perluasan perkebunan kelapa sawit ataupun penggunaan untuk keperluan non pertanian yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Program Gertak Tanpa Dusta juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian yang sebelumnya hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana dampak digulirkannya kebijakan Program Gertak Tanpa Dusta terhadap kondisi perekonomian masyarakat dengan mengambil judul: **“Dampak Kebijakan Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun (GERTAK TANPA DUSTA) Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**.

LANDASAN TEORI

1. Kebijakan

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah.

Menurut Marzali (2020), kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Formulasi merupakan turunan dari formula yang berarti untuk pengembangan metode, rencana untuk tindakan dalam suatu masalah. Ini merupakan permulaan dari kebijakan pengembangan fase atau tahap dalam kebijakan publik. Hal yang paling khas dalam tahap ini adalah bagaimana menyatukan persepsi seseorang tentang kebutuhan dan kepentingan masyarakat tentang kebutuhan yang muncul di masyarakat, bagaimana dilaksanakan, siapa yang terlibat, dan siapa yang dapat manfaat atau keuntungan dari isu tersebut. Formulasi merupakan proses yang lebih menyeluruh, termasuk perencanaan dan usaha yang kurang sistemik untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap masalah-masalah publik (Nugroho, 2003).

Menurut Anderson (2011) bahwa formulasi kebijakan adalah bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut dan siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan.

Formulasi kebijakan sebagai suatu proses menurut Winarno (2014) dapat dipandang dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Sejalan dengan pendapat tersebut, proses formulasi kebijakan ke dalam tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan.

2. Kebijakan Publik

Pendapat Thomas Dye (Subarsono, 2005) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Nugroho (2005) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, sehingga kebijakan publik mudah untuk dipahami dan mudah diukur, bahwa terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan, yaitu:

- a. Tujuan tertentu yang ingin dicapai.
- b. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan.
- c. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan.
- d. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi.
- e. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Penyediaan berbagai input dimaksudkan untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi yang akan dilaksanakan atau diterapkan.

2.1 Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Dunn (2003) menyebutkan bahwa dalam pembuatan kebijakan publik, proses atau tahap-tahap yang dilaluinya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda
- b. Tahap formulasi kebijakan
- c. Tahap implementasi kebijakan
- d. Tahap penilaian kebijakan

Selanjutnya, sebagai pembantu formulasi atau perumusan kebijakan yang berorientasi kepada tujuan (*goal oriented*) dapat dirinci dalam susunan kegiatan sebagai berikut (Nugroho, 2003):

1. Tetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu
2. Periksa kecukupan sumber daya yang tersedia
3. Perumusan kebijakan

Kebijakan pemerintah dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Demikian halnya dengan proses pembuatan kebijakan GERTAK TANPA DUSTA yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dalam perumusan hingga pelaksanaannya melalui proses yang panjang serta melalui berbagai tahapan.

2.2 Model-Model Formulasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya ada empat belas macam model perumusan kebijakan, dan keempat belas model tersebut dikelompokkan ke dalam dua model, yaitu model elite dan model pluralis (Parson, 2011). Adapun model perumusan kebijakan tersebut antara lain:

- a. Model Sistem
- b. Model Rasional Komprehensif
- c. Model Penambahan
- d. Model Penyelidikan Campuran
- e. Model Elit
- f. Model Kelompok
- g. Model Demokrasi

Berdasarkan model-model formulasi kebijakan publik yang diuraikan di atas menjadi acuan dan pedoman untuk mengetahui bagaimana model kebijakan GERTAK TANPA DUSTA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2.3 Aktor-Aktor Formulasi Kebijakan

Dalam perspektif ilmu politik, analisis terhadap proses kebijakan harus terfokus pada aktor-aktor. Para aktor tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang menunjukkan kekuatannya mempengaruhi proses kebijakan. Para aktor dan kekuatannya tersebut diperinci sebagai berikut:

- a. Lembaga Kepresidenan
- b. Dewan Perwakilan Rakyat
- c. Birokrat
- d. Lembaga Yudikatif
- e. Partai Politik
- f. Kelompok-kelompok Kepentingan
- g. Media Massa
- h. Kelompok Intelektual

2.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III) yang dikutip oleh Winarno (2014) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber-sumber
- 3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku
- 4) Struktur birokrasi

Menurut teori proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Winarno (2014), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber-sumber kebijakan
- 3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 4) Karakteristik badan-badan pelaksana
- 5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- 6) Kecenderungan para pelaksana

2.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Sunggono (2002), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a) Isi kebijakan
- b) Informasi
- c) Dukungan
- d) Pembagian Potensi

2.6 Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Publik

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

- a) Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri
- b) Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan.
- c) Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum.
- d) Warga masyarakat sebagai obyek.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara serta metode dokumentasi yang ada hubungannya dengan judul. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Dampak Kebijakan Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun (Gertak Tanpa Dusta) Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pemasok terbesar hasil-hasil pertanian dan mempunyai lahan sawah yang paling luas di antara 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Di samping itu juga merupakan penghasil jagung dan kedelai terbanyak di Provinsi Jambi, yaitu jagung 5.230 ton dan kedelai 3.379 ton. Meskipun demikian apabila dibandingkan antara luas panen sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 32.940 ha, dengan luas baku lahan sawah seluas 43.824 ha menunjukkan bahwa indeks pertanaman padi kurang dari 100 (IP-75), yang mencirikan bahwa baru 75% lahan yang sudah dibuka dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil karakterisasi potensi sumberdaya lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman pangan dengan sistem pertanian lahan basah (padi sawah umumnya) 28.943 ha, untuk intensifikasi padi sawah seluas 105.466 ha, dan pertanian lahan kering 113.203 ha, maka peluang untuk meningkatkan luas tanam dan produksi padi maupun palawija (jagung dan kedelai) masih cukup besar, di mana luas baku lahan sawah yang ada baru sekitar 43.843 ha dan yang terluas adalah lahan sawah pasang surut.

Menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi di atas, maka langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan usaha pertanian adalah dengan mengeluarkan sebuah kebijakan atau program yang dikenal dengan nama Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun (GERTAK TANPA DUSTA) yang berlokasi di Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang dengan luas lahan sebanyak 625 hektar yang dikelola oleh 10 (sepuluh) kelompok tani dari total 16 kelompok tani yang ada di Desa Simpang Datuk.

Lahirnya kebijakan Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun (GERTAK TANPA DUSTA) berawal dari Laporan Bupati Tanjung Jabung Timur pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka puncak Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur kedua belas tanggal 19 Oktober 2011. Saat itu, Bapak Zumi Zola Zulkifli selaku Bupati dalam laporannya menyampaikan pentingnya dikeluarkan sebuah kebijakan dalam bidang pertanian.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memandang arti penting padi dan beras karena fenomena yang terjadi belakangan ini adalah banyak petani yang beralih profesi dari petani tanaman pangan menjadi petani di sektor perkebunan, terutama perkebunan sawit tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi beberapa tahun ke depan. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun (GERTAK TANPA DUSTA) tersebut.

Kebijakan Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun (GERTAK TANPA DUSTA) berawal dari gerakan serentak menanam pohon. Gerakan tersebut merupakan dorongan agar masyarakat Tanjung Jabung Timur mengubah *mindset* (pola pikir) mereka untuk berani menanam tanaman pertanian. Langkah tersebut memang terbilang berani, mengingat lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah merupakan daerah gambut dengan air asam. Lahan pertanian yang bagi sebagian masyarakat dinilai tidak mudah untuk diolah.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak gentar dengan keluhan para petani saat pertama kali menggulirkan program tersebut. Pada tahap awal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menantang petani untuk menanam cabe. Alasannya satu, saat sedang krisis cabe, harganya bisa melambung tinggi.

Awal pencanangan program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun (GERTAK TANPA DUSTA) benar-benar ditolak oleh masyarakat, tetapi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap melakukan penyusunan agenda tersebut dan menjadikannya sebagai prioritas. Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen bahwa kalau gagal, semua modal yang dikeluarkan oleh petani akan diganti dan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sejak diimplementasikan tahun 2011, Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun (GERTAK TANPA DUSTA) menuai keberhasilan yang sangat menggembirakan. Pencapaian produksi padi di Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang merupakan buah dari *grand design* dan *pilot project* pembangunan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengedepankan sinergitas program dan kegiatan pertanian mulai dari tingkat pusat, kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa. Dan tentu saja keberhasilan pencapaian produksi padi ini merupakan hasil kerja keras petani yang dibimbing oleh para Petugas Penyuluhan Pertanian (PPL) di lapangan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kondisi hasil pertanian di Desa Simpang Datuk sebelum kebijakan GERTAK Tanpa Dusta diberlakukan cenderung tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat, minimnya pengetahuan serta terbatasnya bantuan dari pemerintah. Terlebih kegiatan pertanian hanya dilakukan satu kali dalam setahun sehingga penghasilan petani tidak banyak membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Tahun 2016 hasil pertanian hanya berkisar 3,6 ton/ha setiap tahunnya, tahun 2017 hanya 1,8 ton/ha karena kondisi pada saat itu kondisi kemarau sehingga masyarakat bisa dikatakan gagal panen, tahun 2018 meningkat menjadi 3,15 ton/ha, tahun 2019 menurun lagi menjadi 3,2 ton/ha dan tahun 2020 masih sekitar 3,2 ton/ha.

Setelah kebijakan GERTAK TANPA DUSTA diberlakukan kondisi hasil pertanian terjadi peningkatan yang cukup signifikan di mana hasil pertanian setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap kali masa panen ditambah lagi

dengan adanya sistem tanam dua kali dalam setahun sehingga panen juga dilaksanakan dua kali setahun. Tahun 2014 hasil panen yang diperoleh berkisar 2,7 ton/ha sekali panen. Kondisi ini memang dinilai masih kurang karena terjadinya kemarau pada tahun itu. Kemudian tahun 2015 meningkat menjadi 4,2 ton/ha/sekali panen, tahun 2016 meningkat lagi menjadi 5,6 ton/ha/sekali panen, tahun 2017 meningkat lagi menjadi 6,2 ton/ha/sekali panen, tahun 2018 terjadi penurunan karena kemarau yaitu hanya berkisar 1,8 ton/ha/sekali panen, tahun 2019 meningkat lagi menjadi 6,7 ton/ha/sekali panen. Dengan demikian, setelah kebijakan ini diberlakukan jumlah hasil panen masyarakat menjadi meningkat beberapa kali lipat dibanding sebelum kebijakan tersebut diberlakukan di Desa Simpang Datuk.

Meningkatnya hasil pertanian tentunya juga berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Para petani sudah sangat merasakan peningkatan perekonomian mereka. Hal ini terjadi karena panen dilakukan dua kali setahun, sehingga pendapatan masyarakat juga meningkat.

Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Dari hasil pertanian mereka sudah bisa membangun rumah permanen, mengkuliahkan anak-anak mereka, membeli kebun dan kendaraan bermotor dan naik haji. Bahkan masyarakat ada yang meminta untuk ditingkatkan lagi menjadi tiga kali tanam dalam setahun.

Setelah kebijakan GERTAK TANPA DUSTA diberlakukan kondisi hasil pertanian terjadi peningkatan yang cukup signifikan di mana hasil pertanian setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap kali masa panen ditambah lagi dengan adanya sistem tanam dua kali dalam setahun sehingga panen juga dilaksanakan dua kali setahun. Tahun 2011 hasil panen yang diperoleh berkisar 2,7 ton/ha sekali panen. Kondisi ini memang dinilai masih kurang karena terjadinya kemarau pada tahun itu. Kemudian tahun 2012 meningkat menjadi 4,2 ton/ha/sekali panen, tahun 2013 meningkat lagi menjadi 5,6 ton/ha/sekali panen, tahun 2014 meningkat lagi menjadi 6,2 ton/ha/sekali panen, tahun 2015 terjadi penurunan karena kemarau yaitu hanya berkisar 1,8 ton/ha/sekali panen, tahun 2016 meningkat lagi menjadi 6,7 ton/ha/sekali panen. Dengan demikian, setelah kebijakan ini diberlakukan jumlah hasil panen masyarakat menjadi meningkat beberapa kali lipat dibanding sebelum kebijakan tersebut diberlakukan di Desa Simpang Datuk.

B. Hambatan yang Dihadapi dalam Proses Munculnya Kebijakan Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun di Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang

Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pertanian merupakan suatu hambatan yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian, seperti

ketidakseimbangan antara luas lahan pertanian yang tersedia dan teknologi yang digunakan merupakan salah satu bentuk permasalahan yang dapat menyebabkan hasil pertanian yang diperoleh relatif. Demikian juga halnya yang terjadi di Desa Simpang Datuk.

Lahirnya kebijakan Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun di Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang memiliki sejumlah hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut terdiri atas:

1. Penolakan dari Masyarakat

Pada saat awal dikeluarkan kebijakan Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun di Desa Simpang Datuk, hampir semua masyarakat menolak kebijakan tersebut dengan berbagai alasan. Menurut pandangan masyarakat saat itu bahwa kebijakan tersebut ibarat mimpi di siang bolong. Sebuah kebijakan yang tidak akan mungkin terealisasi dengan berbagai permasalahan.

2. Terbatasnya Lahan Pertanian

Terbatasnya lahan yang dimaksud adalah karena banyaknya terjadi alih fungsi lahan dari sebelumnya sektor pertanian beralih ke sektor perkebunan terutama sawit dan kelapa. Masyarakat beranggapan bahwa kalau bertani hasilnya tidak seberapa jauh lebih besar kalau dialihkan ke perkebunan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ali selaku masyarakat Desa Simpang Datuk mengemukakan sebagai berikut:

“Saya beralih ke bidang perkebunan dengan menanam sawit karena lebih menjanjikan dibanding dengan menanam padi, namun setelah melihat kawan-kawan berhasil menanam padi dua kali setahun, maka tanaman sawit saya yang berlokasi dekat dengan lokasi GERTAK TANPA DUSTA, sawit-sawit saya cabut kembali karena memang belum terlalu besar” (Wawancara, tangga 22 Jannuari 2022).

Permasalahan yang terjadi di Desa Simpang Datuk adalah semakin berkurangnya lahan pertanian. Ketersediaan lahan yang minim sebagian besar disebabkan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada petani sehingga menimbulkan ketimpangan struktur agraria.

3. Faktor Umur Petani

Umur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan bekerja dan cara berfikir seseorang. Umur biasanya berkorelasi negatif dengan kemampuan bekerja dan cara berfikir seseorang. Umur biasanya berkorelasi negatif dengan kemampuan kerja petani, namun karena dengan pengalaman yang tinggi mereka dapat meningkatkan pengelolaan usaha tani.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Ambo Sennang selaku Ketua Kelompok Tani Tani Lestari menyebutkan bahwa:

"Rata-rata umur petani di daerah kami berkisar antara 41-49 tahun. Hanya ada beberapa orang saja yang sudah berusia di atas 50 tahun" (Wawancara, tanggal 22 Januari 2022).

Dengan usia yang berkisar antara 41-49 tahun, hal ini berarti petani masih tergolong usia produktif untuk mengelola hasil usaha taninya dan berupaya untuk mencapai kesejahteraan keluarganya. Di samping itu dengan usia yang relatif masih muda, maka petani di daerah penelitian dinilai masih memiliki inovasi dan peluang untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas usaha taninya.

4. Tingkat Pendidikan Petani

Tingkat pendidikan pada umumnya mempengaruhi cara berpikir seseorang dalam mengambil keputusan terutama yang berkaitan dengan usaha taninya. Hasil menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani di Desa Simpang Datuk tergolong sedang pada umumnya petani berpendidikan SD (Sekolah Dasar). Tingkat pendidikan sebagian besar petani di Desa Simpang Datuk hanya berupa lulusan sekolah dasar. Umumnya petani yang ada masih memegang sisi tradisional dan hanya ada beberapa orang berpendidikan setingkat SMA bahkan tidak ada petani pada tingkatan berpendidikan perguruan tinggi. Di mana, kultur tersebut cenderung membuat petani enggan mengarah menuju perubahan.

5. Pengalaman Bertanam Padi

Pengalaman berusaha tani yang dimaksud adalah lamanya seorang petani dalam mengelola atau mengusahakan lahan usaha taninya. Dengan pengalaman yang mereka miliki dapat dijadikan sebagai pedoman pada masa akan datang untuk menjadikan usaha taninya meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan pengalaman berusaha tani petani di Desa Simpang Datuk, masing masing petani mempunyai pengalaman berusaha tani rata-rata 25 tahun. Sebagian besar petani mempunyai pengalaman berusaha tani yang cukup lama. Hanya saja berdasarkan observasi yang dilakukan diketahui bahwa meskipun memiliki pengalaman yang cukup lama namun sistem yang digunakan masih bersifat tradisional.

Hal tersebut dapat mempengaruhi petani dalam menjalankan kegiatan usaha taninya, juga dapat berperan dalam pengambilan keputusan dari setiap jenis kegiatan serta dapat menentukan langkah-langkah atau tindakan selanjutnya agar dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

6. Intensitas Penyuluhan

Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pertanian merupakan suatu hambatan yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian, seperti ketidakseimbangan antara luas lahan pertanian yang tersedia dan teknologi yang digunakan merupakan salah satu bentuk permasalahan yang dapat menyebabkan

hasil pertanian yang diperoleh relatif rendah. Begitu pula halnya yang terjadi di Desa Simpang Datuk.

Intensitas/frekuensi kegiatan penyuluhan oleh penyuluhan (PPL) secara langsung untuk membimbing petani dalam mengusahakan tanam dua kali dalam satu tahun permusim tanam sangat membantu petani dalam mengatasi masalahnya. Hal ini dikarenakan dengan intensitas penyuluhan yang teratur dan bersinambungan oleh penyuluhan dapat membangkitkan motivasi petani untuk melakukan apa saja yang dianjurkan.

Dari 51 petani terungkap bahwa intensitas penyuluhan tentang sistem tanam dua kali dalam satu tahun tergolong dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan di Desa Simpang Datuk hanya terdapat 1 (satu) orang penyuluhan pertanian yang bertugas membimbing dan secara khusus mendampingi petani. Namun tidak semua petani rutin mengikuti kegiatan tersebut, terkadang mereka diwakili/digantikan oleh istri atau anaknya. Selain penyuluhan dalam bentuk pertemuan kelompok, ada juga secara individu tapi terbatas jangkauannya karena keterbatasan waktu yang dimiliki.

Bila ditinjau dari aspek kelembagaan, permasalahan yang kelembagaan yang terjadi di Desa Simpang Datuk adalah kelompok tani belum mampu aktif dan memberikan fungsi yang optimal kepada petani. Selain itu, adanya pelayanan penyuluhan yang belum mampu menyentuh seluruh petani merupakan permasalahan petani yang perlu di atasi agar kesejahteraan petani dapat terwujud.

7. Permodalan

Permodalan merupakan aspek penting dalam kegiatan pertanian. Permodalan berdasar sifatnya, dibedakan atas dua macam yaitu modal tetap ialah modal yang tidak habis pakai dalam satu kali produksi. Modal yang kedua yaitu modal tidak tetap. Modal tidak tetap, yaitu modal yang habis dalam satu kali proses produksi. Modal tidak tetap, merupakan modal yang setiap akan berproduksi kembali harus diganti dengan yang baru. Dalam kegiatan pertanian di Desa Simpang Datuk, permasalahan permodalan yang terjadi antara lain semakin sempitnya lahan pertanian sebagai modal utama dalam kegiatan pertanian, dan meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga sarana produksi pertanian.

Masalah permodalan inilah yang menjadi permasalahan ketika pada awalnya kebijakan GERTAK TANPA DUSTA tersebut akan diimplementasikan. Masyarakat menganggap untuk mengubah atau menggarap lahan yang ada membutuhkan modal yang besar, seperti penyediaan air, pupuk serta mesin traktor karena lahan yang ada sebelum dijadikan lahan pertanian merupakan semak belukar.

Menurut wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku petani menyatakan sebagai berikut:

“Saya awalnya termasuk orang yang tidak setuju dengan adanya kebijakan tanam padi dua kali setahun tersebut, karena selain kondisi lahan yang ada untuk mengubahnya menjadi lahan pertanian tentunya butuh tenaga serta modal yang banyak, tapi untunglah pemerintah kabupaten mau membantu” (Wawancara, tanggal 22 Januari 2022).

Senada dengan yang dikatakan dengan Bapak Nganro selaku petani juga mengungkapkan sebagai berikut:

“Permasalahan dana memang menjadi kendala, namun saat ini kami sudah memiliki koperasi sendiri sehingga apabila kami butuh modal tinggal datang ke koperasi maka pasti diberikan bantuan. Apalagi saat ini lahan yang kami kelola sudah menghasilkan sehingga masalah modal atau dana tidak lagi menjadi kendala utama” (Wawancara, tanggal 22 Januari 2022).

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan beberapa langkah, yaitu:

a. Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU)

Bantuan langsung benih unggul adalah sejumlah tertentu benih varietas unggul bermutu yang disalurkan oleh pemerintah secara gratis kepada petani (kelompok tani) yang ditetapkan. Di Desa Simpang Datuk pemberian benih unggul kepada petani merupakan suatu yang penting untuk dilakukan, karena benih merupakan suatu yang dapat menunjang keberhasilan usaha tani. Pemberian benih ini dilakukan secara langsung di mana disalurkan kepada petani melalui beberapa kelompok tani yang ada di Desa Simpang Datuk.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa selain benih juga diberikan bantuan berupa racun rumput, racun hama serta racun tikus. Artinya, pemerintah kabupaten sangat antusias dalam pengembangan pertanian melalui program tersebut.

b. Bantuan Pupuk

Pemberian bantuan pupuk diberikan dengan maksud selain untuk meningkatkan hasil pertanian juga untuk meringankan beban petani. Pemberian bantuan pupuk diberikan kepada petani setiap masa tanam. Selain benih dan racun juga diberikan bantuan kepada setiap petani berupa pupuk. Adapun jenis pupuk yang disalurkan kepada masing-masing petani melalui kelompok taninya adalah berupa pupuk urea sebanyak 150 kg/ha, SC 36 sebanyak 100 kg/ha serta SCL sebanyak 75 kg/ha. Dengan demikian, ada 3 (tiga) jenis pupuk yang diberikan untuk setiap kali masa tanam yakni pupuk urea sebanyak 150 kg/ha, SC 36 sebanyak 100 kg/ha serta SCL sebanyak 75 kg/ha.

c. Bantuan alat mesin pertanian

Bantuan alat mesin pertanian yang disiapkan untuk membantu para petani dalam mengelola usaha padi di Desa Simpang Datuk ini adalah pemberian alat pengelolaan tanah (*hand traktor*) di beberapa petani melalui kelompok-kelompok

tani. Jumlah alat pengelolaan tanah (*hand traktor*) yang diberikan kepada masing-masing kelompok tani adalah sebanyak 4 (empat) unit/kelompok.

Pemilihan petani yang diberikan bantuan traktor ini dengan dasar pertimbangan bahwa kriteria petani tersebut mempunyai potensi untuk menambah hasil produksi dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti memiliki lahan yang cukup luas, mempunyai sumber daya modal dan mempunyai jaringan yang luas terutama ke kelompok-kelompok tani lainnya dan juga jaringan ke pemerintah.

d. Upaya menekan Alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan sesuatu yang meresahkan, karena Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang subur. Alih fungsi lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di antaranya:

1) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat rancangan pembangunan kabupaten untuk menunjukkan di mana daerah produksi pertanian dan di mana daerah pemukiman

Pembuatan rancangan pembangunan kabupaten untuk menunjukkan di mana daerah produksi pertanian dan di mana daerah pemukiman berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031;

2) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat sistem pertanian dengan sistem tanam dua kali dalam satu tahun

Pembuatan sistem pertanian dengan sistem tanam dua kali dalam satu tahun dimaksudkan untuk menghindari alih fungsi lahan karena pemanfaatan lahan yang sudah bernilai ekonomis akibatnya maraknya alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dikeluarkannya kebijakan GERTAK TANPA DUSTA di Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini karena intensitas tanam yang dilakukan dua kali dalam satu tahun.
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses munculnya kebijakan Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Satu Tahun di Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang adalah adanya penolakan dari masyarakat, terbatasnya lahan pertanian, faktor umur petani, tingkat pendidikan petani, pengalaman bertanam padi, intensitas penyuluhan serta permodalan. Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pemberian bantuan berupa Bantuan Langsung Banjir Unggul

(BLBU), bantuan pupuk, bantuan alat mesin pertanian serta menekan alih fungsi lahan.

Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka beberapa saran yang diajukan adalah:

1. Agar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat lagi kebijakan serupa dengan mencari lokasi lain di wilayah Tanjung Jabung Timur karena program GERTAK TANPA DUSTA tersebut telah melalui proses yang panjang serta pertimbangan yang matang dan hasilnya juga telah dirasakan oleh masyarakat;
2. Terkait dengan permasalahan yang ditemui dalam implementasi kebijakan GERTAK TANPA DUSTA, maka disarankan agar penyuluhan lebih ditingkatkan lagi demi menambah wawasan dan pengetahuan petani. Kalau perlu dilakukan studi banding ke daerah-daerah lain yang di Indonesia sebagai percontohan.

REFERENSI:

Buku-Buku

- Dunn, William N.. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. : Gadja Mada University Press.
- Lubis, Solly. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandun: Manar Maju.
- Marzali, Amri. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexi J. (2011). *Penelitian Metodologi Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Dunn, William N.. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. : Gadja Mada University Press.
- Parson, Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktis Analisis Kebijakan*. Kencana, Jakarta, 2011.
- Subarsono, *Analisa Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Ekonomi Politik Paradigma dan Teori Pilihan Publik*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Cetakan Kedua, CAPS, Yogyakarta, 2014.

Hasil Penelitian

- Alfian, Sukma Primana Dewi. (2008). Analisis Permasalahan Struktural Masyarakat Petani dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian (Studi Kasus:

- Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat). *Skripsi*, Fakultas Pertanian IPB, Bogor.
- Al-Hakam, Andi Armal. (2015). Over Stock dan Peningkatakn Pendapatan Petani di Sulawesi Selatan, *Skripsi*, Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Lalla, Hajrah (2012). Adopsi Petani Padi Sawah Terhadap Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1 di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sajogyo (2003). Kebijakan Publik dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Vol. II - No. 2 - April.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031.